

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah DPMTSP Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan Triwulan III Tahun 2023

1. Presentase Pencapaian Nilai realisasi investasi 100%
2. Nilai Reformasi Birokrasi Pada DPMTSP Kota Balikpapan 34,12
3. Presentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat 0,11%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan								
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12							15=14/5X100%	16	17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3	4																									
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentas Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	100	4.349.488.000	100	657.023.564	85	2.500.000.000	0%	34.422.737	0%	74.518.817	0%	659.762.659	0%	-	0%	768.704.213	0%	30,75%	100	1.425.727.777	100,00%	32,78%	DPMTSP	Data Capaian akan diinputkan pada triwulan IV
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Naiknaik Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	25	4.349.488.000	5	657.023.564	5	2.500.000.000	0%	34.422.737	0%	74.518.817	0%	659.762.659	0%	-	0%	768.704.213	0%	30,75%	5	1.425.727.777	20,00%	32,78%		Data Capaian akan diinputkan pada triwulan IV
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	0		-	-	-	5	2.500.000.000	0	34.422.737	1	74.518.817	0	659.762.659	0	0	1	768.704.213	20%	30,75%	1	768.704.213	0%	0%	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	25	2.389.355.500	-	406.689.813	5	167.500.000	0%	0	0	-	0	4.800.000	0	-	0%	4.800.000	0%	2,87%	-	411.489.813	0,00%	17,22%	DPMTSP	Sedang dalam tahap pembahasan Raperda insentif kemudahan penanaman modal di dewan
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	%	100	1.239.355.500	20	135.234.762	20	167.500.000	0%	0	0	-	20	4.800.000	0%	-	20	4.800.000	100%	2,87%	40	140.034.762	40,0%	11,30%		Sedang dalam tahap pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan antara pihak ketiga dan Pejabat Pengadaan
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1	92.500.000	0	0	0	-	1	4.800.000	0	-	1	4.800.000	100%	5,19%	1	4.800.000	0%	0%		Saat ini sudah dalam proses penyusunan draf NA dan draf Raperda dari Tim Narasumber
2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1	75.000.000	0	0	0	-	1	-	0	-	1	-	100%	0,00%	1	-	0%	0%		Sudah dilakukan pengadaan melalui LPSE dan akan mulai dilakukan kontrak dengan penyedia
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	%	100	3.053.150.000	100	446.941.748	100	575.260.000	0	0	0	88.514.900	75%	283.739.786	-	75%	269.127.886	0,75%	46,78%	101	716.069.634	100,8%	23,45%	DPMTSP	Fasilitasi permasalahan perusahaan dengan jumlah investasi yang besar (debottlenecking) bekerjasama dengan BKPM/Kementerian Investasi, dan sampai saat ini sudah masuk periode penyampaian LKPM Triwulan 3 Tahun 2023 (1 - 10 Oktober 2023).	
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	1650	3.053.150.000	1.602	446.941.748	315	575.260.000	635	0	1238	88.514.900	2572	283.739.786	-	4445	269.127.886	1411%	46,78%	6.047	716.069.634	366,5%	23,45%		Data LKPM sampai pelaporan Tw 2 Tahun 2023 (penyampaian LKPM tgl 1 - 10 Juli 2023)	
3	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	0	-	-	-	4	344.300.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Telah dilakukan Pergeseran anggaran dan anggaran Pemantauan telah didistribusikan ke sub kegiatan sesuai Juknis DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (Pembinaan dan Penguasaan)
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD)	Pelaku Usaha	0	-	-	-	100	110.448.000	0	0	0	-	100	269.127.886	0	-	100	269.127.886	100%	243,67%	100	269.127.886	0%	0%		Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kemudahan Berusaha pada tgl 7 September 2023, pendampingan pengisian LKPM Online secara online (via zoom dan via wa konsultasi LKPM Datar PMI) dan secara offline (loket pelayanan LKPM, pembinaan langsung ke Perusahaan).
		Jumlah Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Penyelesaian permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha (DAK NF FPM) (Kegiatan usaha)	Kegiatan Usaha	0	-	-	-	-	9	358.133.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Sampai saat ini masih belum ada perusahaan yang meminta untuk difasilitasi permasalahannya terkait penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
3	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha (DAK NF FPM) (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	0	-	-	-	-	251	-	0	0	0	260	0	-	260	-	103.59%	0%	260	-	0%	0%		Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebanyak 2 kegiatan, pada tgl 9 & 10 Agustus 2023 dan 23 & 24 Agustus 2023.		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (PAD)	Kegiatan Usaha	0	-	-	-	6	120.512.000	0	0	2	88.514.900	0	14.611.900	0	-	2	103.126.800	33,33%	85,57%	2	103.126.800	0%	0%		Kegiatan yang sudah berjalan : makan minum rapat, sewa mobil, pembelian BBM, kegiatan Bimtek Pengawasan untuk Perangkat Daerah Teknis Pengawasan di Kota Balikpapan, serta kegiatan Pengawasan OSS RBA untuk 2 kegiatan usaha.
		Jumlah Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha yang memperoleh Pengawasan Penanaman Modal (DAK NF FPM) (Kegiatan Usaha)	Kegiatan Usaha	0	-	-	-	-	16	40.000.000	0	-	0	-	9	-	-	9	-	56%	0%	9	-	0%	0%		Telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan OSS RBA untuk 9 kegiatan usaha.	
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	%	88	3.982.258.500	91	551.748.100	85	374.320.000	-	94,77	124.867.425	0	73.638.500	0	-	94,77	198.505.925	111,49%	53%	186	750.255.025	211,1%	18,84%	DPMTSP	Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penerbitan izin via oss.go.id	
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang Terpenuhi	%	100	3.982.258.500	100	551.748.100	100	374.320.000	-	100	124.867.425	0	73.638.500	-	100	198.505.925	100%	53%	200	750.255.025	200,0%	18,84%		Rasio data capaian mencapai 100% pada triwulan II		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output) (Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
								I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%					16	17		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17									
6	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMTSP Kota Balikpapan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	82	64.400.084.000	78,02	10.146.275.325	79	13.191.281.000	0,00	2.571.741.525	0,00	3.390.152.394	0,00	2.810.256.203	78,02	-	78,02	8.772.150.122	98,76%	66,96%	156	18.918.425.447	190,3%	29,38%		DPMTSP	Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan III	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Skor	81	47.046.043.900	78,02	7.520.444.176	77,5	8.875.431.000	0,00	1.700.124.850	0,00	2.500.523.761	0,00	1.629.735.025	78,02	-	78,02	5.830.383.636	101%	65,69%	156	13.350.827.812	192,6%	28,38%			Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan III	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0		-	-	60	8.875.431.000	0	1.700.124.850	48	2.500.523.761	0	1.629.735.025	0	-	48	5.830.383.636	80%	65,69%	48	5.830.383.636	0	0%			Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Skor	81	4.940.000.000	78,02	1.042.145.964	77	1.349.129.000	0,00	387.520.594	0,00	222.933.024	0,00	540.959.118	78,02	-	78,02	1.151.412.736	101%	85,34%	156	2.193.558.700	192,6%	44,40%			Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan III	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0		-	-	1	39.993.000	0	0	0	27.992.000	0	10.016.000	0	-	0	38.008.000	0%	95%	-	38.008.000	0%	0%			Data akan diinputkan pada triwulan IV	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0		-	-	8	199.927.000	0	0	0	-	0	122.690.000	0	0	0	122.690.000	0%	61%	-	122.690.000	0%	0%			Sedang dalam proses pengamprahan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0		-	-	3	536.625.000		287.361.900		15.357.500	0	170.341.300	0	0	0	473.060.700	0%	88,15%	-	473.060.700	0%	0%			Data akan diinputkan pada triwulan IV	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0		-	-	2	74.999.000	0	0	0	34.388.000	0	28.203.250	0	0	0	62.591.250	0%	83,46%	-	62.591.250	0%	0%			Data akan diinputkan pada triwulan IV	
		Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0		-	-	1	27.585.000	0	4.875.000		5.537.500	-	14.430.000	-	0	0	24.842.500	0%	90,06%	-	24.842.500	0%	0%			Data akan diinputkan pada triwulan IV	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0		-	-	65	470.000.000	11	95.283.694	19	139.658.024	0	195.278.568	0	0	30	430.220.286	46%	91,54%	30	430.220.286	0%	0%			Data berdasarkan jumlah laporan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	82	8.425.000.000	78,02	1.188.729.460	79	2.276.721.000	0,00	403.626.793	0,00	574.212.863	0,00	545.300.087	78,02	-	78,02	1.523.139.743	98,76%	66,90%	156	2.711.869.203	190,3%	32,19%			Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan III	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0		-	-	1	10.000.000		3.750.000		750.000	0	-	0	-	0	4.500.000	0%	45,00%	-	4.500.000	0%	0%			Data akan diinputkan pada triwulan IV	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0		-	-	12	550.000.000	3	130.205.097	3	116.476.157	0	138.788.043	0	-	6	385.469.297	50%	70,09%	6	385.469.297	0%	0%			Terdiri atas laporan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air (per bulan)	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0		-	-	3	1.716.721.000	0	269.671.696		456.986.706	0	406.512.044	0	0	0,0	1.133.170.446	100%	66,01%	-	1.133.170.446	0%	0%			Data akan diinputkan pada triwulan IV	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	81	3.689.040.100	78,02	394.955.725	77,5	600.000.000	0,00	80.469.288	0,00	92.482.746	0,00	94.261.973	78,02	-	78,02	267.214.007	101%	44,54%	156	662.169.732	193,8%	17,95%			Survei IKM akan dilaksanakan pada triwulan III	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0		-	-	24	350.000.000	4	80.469.288	12	45.019.746	0	52.924.848	0	-	16	178.413.882	67%	50,98%	16	178.413.882	0%	0%			Pembayaran perizin kendaraan dinas yang telah dilaksanakan adalah sejumlah 16 unit	

		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0		-	-	284	250.000.000	0		0	39	47.463.000	0	41.337.125	0	-	39	88.800.125	14%	35,52%	39	88.800.125	0%	0%		Pemeliharaan yang telah dilaksanakan adalah pemeliharaan AC, Komputer laptop dan printer
TOTAL						85.043.923.500				17.064.300.000			2.622.910.524		3.785.772.436		3.968.778.598		-		10.377.461.558								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																						37,77%	63,22%			0,00%	0,00%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																						220,28%	47,14%			160,89%	24,94%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						56,8%	46,0%			141,76%	17,34%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan DPMPPTSP Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan DPMPPTSP dalam mencapai target dan Sasaran kinerja 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran telah mempedonomi peraturan yang berlaku
Faktor Penghambat pencapaian kinerja	1.Terdapat target kinerja yang tidak / belum terealisasi dikarenkan terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III 2. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD, dikarenakan keterbatasan anggaran
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	1. Peningkatan Koordinasi dan komitmen bersama seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk pencapaian target kinerja 2. Untuk target kinerja yang belum tercapai, dapat dilakukan analisis lebih lanjut terkait kendala yang dihadapi dalam pencapaian targetnya
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	1. Komitmen bersama seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Meningkatkan komitmen seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk melaksanakan dan menganalisa hasil capaian kinerjanya secara rutin 3. Meningkatkan kelengkapan dokumentasi pencapaian target kinerja sehingga mempermudah dalam melaksanakan perhitungan dan pelaporan kinerja DPMPPTSP Kota Balikpapan

Disusun :
Balikpapan, 11 Juli 2023
Kepala DPMPPTSP Kota Balikpapan
Kota Balikpapan

Dievaluasi
Balikpapan, 11 Juli 2023
Kepala Bappeda Lumbang
Kota Balikpapan

Hasbullah Helmi

Mumi

Petunjuk Pengisian Formulir E.81:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
- Disi dengan nama Perangkat Daerah kabupaten/kota yang Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota.
- Disi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi sebagai berikut:
 - Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang memencinkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah ha
 - Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikalikan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus se
- Kolom (5) diisi sebagai berikut:
 - Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kotasampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
 - Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Kolom (6) diisi sebagai berikut :
 - Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
 - Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
 - Contoh: Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun 2007/2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);
- Kolom (7) diisi sebagai berikut:
 - Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1); Untuk baris program diisi dengan:
 - jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.
 - Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan;
 - Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;
 - Kolom (13) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp); Kolom (13) = (Kolom (12) : Kolom (7)) X 100%
 - Kolom (13)(K) = (Kolom (12)(K): Kolom (7)(K)) X 100%
 - Kolom (13)(Rp) = (Kolom (12)(Rp): Kolom (7)(Rp)) X 100%;
 - Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
 - Kolom (14) = Kolom (6) + Kolom (12)
 - Kolom (14)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)
 - Kolom (14)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)
 - Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp); Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%
 - Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K): Kolom (5)(K)) X 100%
 - Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp): Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan
 - Kolom (16) diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
 - Kolom (17) diisi dengan penjelasan singkat tentang tercapai atau tidak tercapainya target kinerja.
 - Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kotadengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kotadengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.

